

STRATEGI DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN *RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II* UNI EROPA TAHUN 2018-2023

Idah Saniyah¹, Try Danuwijaya²

^{1,2} Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: idahsaniyah7@gmail.com

Abstrak

Kebijakan pembatasan CPO sebagai bahan biofuel khususnya biodiesel yang dikeluarkan oleh Uni Eropa melalui Renewable Energy Directive II telah memberikan dampak yang signifikan terhadap laju ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar ekspor CPO ke Uni Eropa digunakan sebagai bahan biodiesel atau sekitar 53% pada tahun 2018. Untuk itu penting bagi pemerintah Indonesia melakukan upaya diplomasi ekonomi dalam menghadapi kebijakan pembatasan ini. Mulai dari mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan optimalisasi diberbagai organisasi internasional seperti CPOPC, ASEAN dan WTO. Namun upaya diplomasi ekonomi tersebut diwarnai oleh berbagai hambatan, baik tarif maupun non-tarif. Untuk itu pemerintah Indonesia memerlukan strategi diplomasi ekonomi lain yang dapat menjadi alternatif ketika pasar Uni Eropa sudah tidak potensial lagi. Seperti pembukaan pasar non-tradisional dan mendorong hilirisasi industri sawit dan mandatori biodiesel.

Kata kunci: Crude Palm Oil; Renewable Energy Directive II; Diplomasi Ekonomi.

Abstract

The policy of limiting CPO as a biofuel ingredient, especially biodiesel, issued by the European Union through the Renewable Energy Directive II has had a significant impact on the rate of Indonesian CPO exports to the European Union. This is because most of the CPO exports to the European Union are used as biodiesel ingredients or around 53% in 2018. For this reason, it is important for the Indonesian government to make economic diplomacy efforts in dealing with this restriction policy. Starting from encouraging sustainability certification such as the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and optimizing in various international organizations such as CPOPC, ASEAN and WTO. However, these economic diplomacy efforts are characterized by various obstacles, both internal and external. For this reason, the Indonesian government needs another economic diplomacy strategy that can be an alternative when the EU market is no longer potential. Such as opening non-traditional markets and encouraging the downstreaming of the palm oil industry and mandatory biodiesel.

Key words: Crude Palm Oil; Renewable Energy Directive II; Economic Diplomacy.

Article History:

Received : 2025-02-03

Revised : 2025-01-20

Accepted : 2025-02-12

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia telah memproduksi sekitar 59% dari total minyak kelapa sawit global. (Tempo, 2023) Hasil dari produksi minyak kelapa sawit tersebut sebagian besar diekspor ke negara-negara tujuan utama seperti India, Uni Eropa dan Cina. Namun, sejak dikeluarkannya *Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II* pada 10 Juni 2019, ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa menghadapi tantangan serius. (Bangun & Hidayat, 2020) Dalam regulasi tersebut, CPO diklasifikasikan sebagai bahan biofuel yang menyumbangkan masalah deforestasi dan masuk dalam kategori High Risk Indirect Land Use Change (High Risk ILUC) atau berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan secara tidak langsung. Oleh karena itu Parlemen Uni Eropa berupaya untuk mengurangi konsumsi CPO sebagai produk biofuel pada tahun 2023 dan menghentikan penggunaan secara total pada tahun 2030. (Suwarno, 2019).

Regulasi tersebut berdampak terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, karena sebagian besar ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa digunakan untuk produk biofuel. Diketahui pada tahun 2018, sekitar 65% impor CPO di Uni Eropa digunakan sebagai produk energi terbarukan, dengan biodiesel sebesar 53%, diikuti dengan 12% untuk pemanas dan listrik, dan sepertiga sisanya yang digunakan untuk makanan, pakan ternak, dan penggunaan industri lainnya. Selain itu, kebijakan ini dapat mempengaruhi negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa, hal ini dikarenakan Uni Eropa sering kali menjadi rujukan kebijakan internasional. Dalam kasus ini misalnya Jepang dan Pakistan sudah mulai melakukan kampanye negatif terhadap produk sawit dengan isu yang sama. (PASPI, 2022).

Merespon regulasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada 18 Maret 2019 menggelar rapat dengan membahas terkait European Union's Delegated Regulation. Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambago, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani. (Saragih & Rahayu, 2022).

Hasil dari rapat tersebut Indonesia menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa karena Indonesia menganggap bahwa RED II merupakan bentuk diskriminasi terhadap CPO Indonesia. Indonesia juga mengupayakan dialog yang mempromosikan Sustainable Development Goals (SDGs) serta akan mengajukan masalah RED II ke World Trade Organization (WTO) sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional. Selain itu kerja sama dengan negara-negara penghasil CPO lainnya dan berfokus pada pengetahuan dan penelitian terkait SDGs juga akan menjadi prioritas dalam menghadapi dampak RED II. Selain itu pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga menegaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi yang strategis, isu kelapa sawit perlu menjadi prioritas diplomasi saat ini. (CNN Indonesia, 2019).

Berbagai upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia nyatanya diwarnai dengan berbagai macam hambatan, mulai dari hambatan tarif maupun non-tarif yang menghalangi masuknya CPO khususnya sebagai bahan biofuel di Uni Eropa. (Liputan 6, 2023) Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih lanjut terkait strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi kebijakan pembatasan CPO berbasis biofuel ke Uni Eropa serta hambatan diplomasi ekonomi yang dihadapi. Maka bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan Renewable Energy Directive II terhadap Crude Palm Oil?"

Indonesia merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2022, Indonesia telah memproduksi sekitar 59% dari total minyak kelapa sawit global. (Tempo, 2023) Hasil dari produksi minyak kelapa sawit tersebut sebagian besar diekspor ke negara-negara tujuan utama seperti India, Uni Eropa dan Cina. Namun, sejak dikeluarkannya *Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II* pada 10 Juni 2019, ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Indonesia ke Uni Eropa menghadapi tantangan serius. (Bangun & Hidayat, 2020) Dalam regulasi tersebut, CPO diklasifikasikan sebagai bahan biofuel yang menyumbangkan masalah deforestasi dan masuk dalam kategori High Risk Indirect Land Use Change (High Risk ILUC) atau berisiko tinggi terhadap perubahan fungsi lahan secara tidak langsung. Oleh karena itu Parlemen Uni Eropa berupaya untuk mengurangi konsumsi CPO sebagai produk biofuel pada tahun 2023 dan menghentikan penggunaan secara total pada tahun 2030. (Suwarno, 2019).

Regulasi tersebut berdampak terhadap ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa, karena sebagian besar ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa digunakan untuk produk biofuel. Diketahui pada tahun 2018, sekitar 65% impor CPO di Uni Eropa digunakan sebagai produk energi terbarukan, dengan biodiesel sebesar 53%, diikuti dengan 12% untuk pemanas dan listrik, dan sepertiga sisanya yang digunakan untuk makanan, pakan ternak, dan penggunaan industri lainnya. Selain itu, kebijakan ini dapat mempengaruhi negara lain untuk menerapkan kebijakan serupa, hal ini dikarenakan Uni Eropa sering kali menjadi rujukan kebijakan internasional. Dalam kasus ini misalnya Jepang dan Pakistan sudah mulai melakukan kampanye negatif terhadap produk sawit dengan isu yang sama. (PASPI, 2022).

Merespon regulasi tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada 18 Maret 2019 menggelar rapat dengan membahas terkait European Union's Delegated Regulation. Rapat tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Kementerian Luar Negeri Peter F. Gontha, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagyo, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan, dan Wakil Ketua III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Togar Sanggani. (Saragih & Rahayu, 2022)

Hasil dari rapat tersebut Indonesia menegaskan penolakannya terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) Uni Eropa karena Indonesia menganggap bahwa RED II merupakan bentuk diskriminasi terhadap CPO Indonesia. Indonesia juga mengupayakan dialog yang mempromosikan Sustainable Development Goals (SDGs) serta akan mengajukan masalah RED II ke World Trade Organization (WTO) sebagai upaya penyelesaian sengketa internasional. Selain itu kerja sama dengan negara-negara penghasil CPO lainnya dan berfokus pada pengetahuan dan penelitian terkait SDGs juga akan menjadi prioritas dalam menghadapi dampak RED II. Selain itu pada tahun yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi juga menegaskan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi yang strategis, isu kelapa sawit perlu menjadi prioritas diplomasi saat ini. (CNN Indonesia, 2019).

Berbagai upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia nyatanya diwarnai dengan berbagai macam hambatan, mulai dari hambatan tarif maupun non-tarif yang menghalangi masuknya CPO khususnya sebagai bahan biofuel di Uni Eropa. (Liputan 6, 2023) Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih lanjut terkait strategi diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mengatasi kebijakan pembatasan CPO berbasis biofuel ke Uni Eropa serta hambatan diplomasi ekonomi yang dihadapi. Maka bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi kebijakan *Renewable Energy Directive II* terhadap Crude Palm Oil?"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka yang dimaksud disini yaitu dengan melakukan pencarian dan penelitian berbasis data sekunder bersumber dari literatur tertulis terkait CPO Indonesia di pasar Eropa yang diperoleh dari berita, teori, analisis, konsep, dan model hasil pemikiran para ahli yang dimuat dalam buku, jurnal-jurnal ilmiah, publikasi data, situs resmi serta penelitian berbasis internet yang tentunya relevan dengan penelitian. Kemudian teknik analisis data menurut Miles dan Huberman menyatakan alur analisis data terbagi menjadi tiga, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saat ini seluruh atensi dari para pemangku kepentingan Indonesia difokuskan pada isu sawit. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyikapi kebijakan RED II menggunakan cara-cara damai melalui pendekatan diplomasi. Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan bahwa dalam melindungi kepentingan ekonomi strategis, maka isu kelapa sawit menjadi prioritas diplomasi Indonesia saat ini. Pemerintah Indonesia merespon kebijakan Renewable Energy Directive II dengan upaya menggunakan diplomasi ekonomi, hal ini sesuai dengan fokus aktivitas diplomasi Indonesia saat ini yang 70-80% diarahkan pada penguatan diplomasi ekonomi. (CNN Indonesia, 2019).

Upaya Pemerintah Indonesia Melalui Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk Joint Mission ke Eropa

Pada 28 Februari 2019 diadakan Pertemuan tingkat menteri ke-6 CPOPC (Council Palm Oil Producing Countries) di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian Kolombia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Industri Utama Malaysia. Dalam pertemuan ini membahas terkait isu kelapa sawit yang mendapat tekanan dari Uni Eropa berupa pembatasan ekspor kelapa sawit melalui RED II Uni Eropa. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk melakukan Joint Mission ke Uni Eropa. Aktivitas Joint Mission tersebut dilakukan pada tanggal 8 sampai 9 April 2019 di Brussels, Belgia. (Kementerian Luar Negeri, 2019) Dalam pertemuan tersebut CPOPC menyampaikan langsung

keberatannya terhadap kebijakan RED II dan keputusan Uni Eropa yang menggolongkan kelapa sawit sebagai tanaman yang berisiko tinggi terhadap ILUC. (BPDB, 2019)

Selama proses negosiasi, CPOPC menyampaikan perspektif kebijakan negara-negara (RED II), yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut hanya bertujuan untuk membatasi dan secara tidak langsung menghambat ekspor impor minyak kelapa sawit ke pasar Eropa. Selain itu, CPOPC menyatakan bahwa larangan tersebut hanya didasarkan pada penelitian ilmiah yang tidak memadai dengan menggunakan Indirect Land Use Change (ILUC) atau perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung. CPOPC menyatakan bahwa kriteria dalam Delegated Regulation dari kebijakan RED II hanya digunakan untuk melarang ekspor dan impor minyak sawit ke pasar energi terbarukan Eropa dalam upaya mempromosikan minyak nabati yang ditanam dan dikembangkan di wilayah Uni Eropa. CPOPC juga menyatakan bahwa kriteria yang digunakan terhadap tanaman kelapa sawit tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan bertentangan dengan fakta dan bertentangan dengan konstitusi Uni Eropa dan Konvensi Internasional di Bidang Ekonomi dan Hak Sosial.

Dengan menyuarakan kekhawatiran terhadap RED II melalui otoritas Uni Eropa, Indonesia dan negara anggota CPOPC memiliki harapan bahwa pihak Uni Eropa dapat mengubah kebijakan tersebut dengan cara yang akan menguntungkan semua pihak terkait, termasuk pihak stakeholder sebagai pengguna minyak sawit di kawasan Eropa. Diplomasi tersebut menghasilkan adanya penundaan larangan Crude Palm Oil (CPO). Uni Eropa menyampaikan melalui trilog akhirnya memutuskan untuk tidak melarang penggunaan biofuel berbasis sawit, minimal hingga tahun 2030, sehingga penundaan tersebut dapat memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan lagi kualitas CPO dan melindungi industri minyak kelapa sawit dari kampanye negatif dengan waktu yang cukup panjang. (Liputan6, 2018).

Kerja Sama Indonesia dengan Belanda dalam Produksi Sawit Berkelanjutan

Belanda merupakan negara importir CPO terbesar di kawasan Uni Eropa. atau sekitar 15% ekspor Indonesia tujuannya adalah ke Belanda. Pada 24 September 2019 dalam sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 yang diselenggarakan di New York, Belanda dan Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan kerja sama dalam program pengembangan produksi sawit berkelanjutan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Pertemuan tersebut diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dan Belanda diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda (Sigrid Kaag). Belanda berkomitmen kuat atas MoU ini dalam upaya mendorong peningkatan produk kelapa sawit Indonesia yang sudah disertifikasi saat akan diekspor, baik ke pasar Belanda maupun meluas ke beberapa pasar di Uni Eropa lainnya. Komitmen itu muncul beriringan dengan adanya sentimen negatif terhadap perindustrian kelapa sawit Indonesia setelah dikeluarkannya kebijakan RED II (Lorensia et al., 2022).

Belanda merupakan negara yang tidak mendukung adanya pembatasan atas pemakaian bahan bakar biofuel dari CPO. Namun Belanda mendukung minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan (sustainable). Dukungan tersebut dilakukan melalui kerja sama peningkatan sustainability kelapa sawit dengan kerjasama produksi kelapa sawit berkelanjutan. Program bernilai EUR 5 juta tersebut dijalankan selama 5 tahun atau dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Kerja sama tersebut membantu terlaksananya program-program produksi kelapa sawit berkelanjutan bagi petani-petani di Sumatra dan Kalimantan, termasuk juga dukungan pada petani kecil dalam memenuhi sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Kerja sama tersebut akan diperluas dengan mencakup juga minyak nabati lainnya dalam konteks kontribusinya terhadap SDGs 2030 (Lorensia et al., 2022).

The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil-Producing Countries

Negara-negara yang tergabung dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) melakukan pertemuan The 2nd Ministerial Meeting of Palm Oil Producing Countries (MMPOPC) pada tanggal 17-18 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia sendiri diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pertemuan tersebut menyepakati beberapa hal yang bertujuan dalam meningkatkan kualitas harga untuk para petani dan rakyat, melanjutkan promosi serta meningkatkan konsumsi biodiesel untuk menyerap lebih banyak minyak sawit kelapa sawit di pasar global termasuk Indonesia dalam implementasi B30, Malaysia berkomitmen mengimplementasikan B20 dan Thailand B10,

kemudian menjalankan promosi terhadap produk sawit ke pasar global, berkomitmen untuk mendorong komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, mengundang negara-negara produsen CPO lain untuk bergabung dalam CPOPC, dan meningkatkan kesejahteraan pada perkebunan rakyat. (Alfianisa, 2021)

Beberapa dari realisasi dari agenda tersebut berhasil, salah satunya berdasarkan konsumsi biodiesel melalui implementasi mandatori B30 di Indonesia pada 1 Januari 2020, lalu Pada tahun 2023, program ini telah merealisasikan B35 dan selanjutnya akan terus ditingkatkan menjadi B40, B50 hingga B100. Selain itu dalam mendorong komoditas sawit berkelanjutan, CPOPC juga berhasil membentuk Scientific Committee (Komite Sains) di bawah CPOPC, yang bertujuan untuk bersama-sama menjawab kampanye negatif yang dilakukan berbagai negara terkait produk-produk kelapa sawit, dengan memberikan fakta atau narasi yang berbasis sains ataupun kajian ilmiah. (Menko Perekonomian RI, 2021) Selain itu juga CPOPC juga mendukung studi R&D di bawah bimbingan dan saran dari Scientific Committee. CPOPC juga berhasil untuk menambah dewan negara produsen minyak sawit, yaitu Honduras sebagai negara ketiga setelah Indonesia dan Malaysia yang menjadi anggota CPOPC. (CNBC Indonesia, 2023)

Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB)

Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendekati negara-negara Uni Eropa setidaknya dua negara dan satu aliansi yang dapat membantu produsen kelapa sawit dunia dari tindakan pembatasan penggunaan CPO yang merugikan produsen CPO, diantaranya yaitu Italia, Jerman, dan European Palm Oil Alliance (EPOA). Kemudian pihak Uni Eropa meminta untuk melakukan konsultasi dagang CPO pada 29 November 2019 yang disetujui Indonesia pada 30 dan 31 Januari 2020 dengan terwujudnya Instruksi Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2019 tentang "Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024." (As, 2022)

Indonesia dan Uni Eropa saling berkomitmen dan berkolaborasi untuk menjadikan produk CPO Indonesia yang ramah lingkungan dan memiliki keberlanjutan yang baik bagi ekosistem. Inpres tersebut memberikan mandat kepada 14 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintah Provinsi sentra penghasil sawit, dan 217 Pemerintah Kabupaten serta penghasil kelapa sawit untuk melaksanakan program RAN KSB. Program dan kegiatan yang terdapat dalam Inpres RAN KSB itu dirancang untuk menciptakan enabling conditions bagi pekebun dan pelaku usaha Indonesia dalam pemenuhan kewajiban sertifikasi ISPO. Pasca terbitnya Inpres RAN KSB, secara kumulatif realisasi sertifikasi telah mencapai sebanyak 883 perusahaan dan 52 koperasi/kelompok pekebun.

Kebijakan lainnya yang diatur dalam Inpres RAN KSB yakni Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pemerintah telah melakukan percepatan program PSR melalui penyederhanaan proses pengajuannya. Realisasi pelaksanaan Program PSR baru mencapai rata-rata 50.000 Ha/tahun atau 28% dari target 180.000 Ha/tahun. Pemerintah telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp 9,25 triliun dengan total luas lahan 331.007 Ha dari tahun 2017 sampai 24 Maret 2024. Sampai saat ini terdapat 9 provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), diantaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Barat. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024)

Pertemuan Indonesia Dengan Uni Eropa Dalam Perundingan Dagang Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA) di Brussel, Belgia

Indonesia dan Uni Eropa melakukan perundingan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA) yang ke-9 pada 2 sampai 6 Desember 2019 di Brussel, Belgia. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyinggung soal isu kelapa sawit setelah diterbitkannya kebijakan RED II. Delegasi Uni Eropa yaitu Helena König yang merupakan ketua runding Uni Eropa merespon hal tersebut dengan menyampaikan bahwa Uni Eropa mengerti seberapa pentingnya industri kelapa sawit bagi Indonesia. Namun Kabinet Uni Eropa yang baru beserta Parlemen Uni Eropa akan lebih berfokus terhadap agenda "hijau" baik secara internal dan eksternal. Salah satunya yaitu dengan menyelaraskan kebijakan seperti RED II yang membatasi bahan biofuel yang masuk dalam kategori high risk ILUC agar

sesuai dengan tujuan dalam mengurangi emisi bersih gas rumah kaca setidaknya 55% pada tahun 2030. (Alfianisa, 2021)

Penyelesaian Sengketa Renewable Energy Directive II melalui World Trade Organization (WTO)

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan Request for Consultation pada 9 Desember 2019 kepada Uni Eropa sebagai tahap inisiasi awal dalam gugatan. Pemerintah Indonesia memberikan kuasa kepada Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk menjadi perwakilan pemerintah Indonesia di Jenewa, Swiss dengan tugas untuk mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di WTO. Gugatan diajukan terhadap kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation Uni Eropa. Menurut Menteri perdagangan Agus Suparmanto, gugatan ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang dilakukan oleh Uni Eropa melalui kebijakan RED II dan Delegated Regulation. Dimana kebijakan RED II yang dikeluarkan Uni Eropa (UE) dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit karena membatasi akses pasar minyak kelapa sawit dan biofuel berbasis minyak kelapa sawit. (As, 2022)

Pada 18 Maret 2020 Indonesia meminta pembentukan panel antar para pihak utama yakni Indonesia dan Uni Eropa, kemudian pada 29 Juni 2020 membentuk panel, kemudian pada 2 November 2020 Indonesia meminta agar komposisi panel ditentukan berdasarkan pendoman dari DSU (Dispute Settlement Understanding). Kemudian pada 12 November 2020 ketua panel menyusun panel tersebut, selanjutnya pada 8 Juni 2021 ketua panel menginformasikan kepada DSB (Dispute Settlement Body) sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Panel. Pada saat ini proses kasus tersebut sudah memasuki babak Appellate Body dan pelaksanaan keputusan, dimana pemerintah Indonesia akan terus memantau dan melakukan diplomasi di WTO untuk mempertahankan CPO Indonesia agar tidak dibatasi dalam memasuki pasar Uni Eropa. (As, 2022)

Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE KE-23 Dalam Pembentukan Joint Working Group (JWG)

Pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa ke-23 dilaksanakan secara online Pada 1 Desember 2020. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 23 Menteri Luar Negeri negara Uni Eropa dan 10 Menteri Luar Negeri negara ASEAN. Konferensi virtual ini dimanfaatkan Indonesia untuk mendiskusikan isu kelapa sawit. Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan bahwa minyak kelapa sawit Indonesia telah memuat aspek ramah lingkungan karena hanya memerlukan area yang kecil dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Lahan kelapa sawit yang dipakai sebesar 17 Juta hektar, minyak nabati lainnya menggunakan lahan lebih luas yakni sebesar 277 juta hektar. Dari pertemuan ini berhasil membentuk *Joint Working Group* yang kemudian disepakati pada 1 Desember 2021, dengan berfokus untuk menganalisa aspek keberlanjutan minyak nabati dengan posisi yang setara dan adil dengan minyak sawit, seperti minyak kanola, minyak bunga matahari, minyak zaitun dan minyak kedelai. Selain itu sepakat untuk melihat tantangan di dalam minyak nabati bersadarkan parameter pencapaian target Pembangunan Berkelanjutan 2030. Hal ini menegaskan bahwa untuk mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030, diperlukan pembahasan yang holistik dan non-diskriminasi terhadap seluruh minyak nabati. JWG mengarahkan untuk meminimalisir pembukaan lahan baru dan meningkatkan efektifitas lahan yang ada, mengingat bahwa permintaan terhadap minyak nabati akan terus meningkat di masa mendatang.

Promosi Sertifikasi Keberlanjutan Indonesian Sustainable Palm Oil

Indonesia telah memiliki sistem sertifikasi sendiri sejak tahun 2011 melalui sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diadopsi oleh Kementerian Pertanian mewakili Pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar global. Sejak adanya kebijakan pembatasan Uni Eropa yang terus menyinggung masalah lingkungan, pemerintah Indonesia melalui Instruksi Presiden pada 22 November 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan 2019-2024. Tujuan dari disahkannya Inpres adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari pekebunan, untuk menyelesaikan kasus legislasi lahan perkebunan, memanfaatkan kelapa sawit sebagai energi terbarukan serta meningkatkan diplomasi untuk menciptakan dan

mempercepat perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang berkelanjutan. (Riady et al., 2023) Upaya percepatan sertifikasi yang dilakukan Indonesia telah menjadi bukti bahwa minyak kelapa sawit Indonesia menuju agenda keberlanjutan. Sehingga upaya diplomasi ekonomi dalam merespon kebijakan RED II dapat dilakukan dengan melakukan edukasi, dan promosi tentang kelapa sawit Indonesia ke pasar global agar tercipta narasi yang baik dan positif. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan citra positif sawit Indonesia, keberlangsungan ekspor, dan meningkatkan ekonomi Indonesia. (Alfianisa, 2021)

Promosi yang Indonesia lakukan yaitu salah satunya Indonesia berpartisipasi dalam pameran Warsaw Humanitarian di Polandia pada 11 sampai 13 Juni 2019 dengan tema yang diusung Indonesia di area paviliunnya adalah "Indonesia Sustainable Palm Oil, it's Contributions to SDGs" pameran tersebut ditunjukan kepada publik bagaimana minyak kelapa sawit telah memiliki sertifikasi ISPO yang menjadi bukti bahwa minyak kelapa sawit dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga SDGs dapat tercapai. Partisipasi Indonesia dalam pameran yang diselenggarakan di Polandia tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat lokal maupun global. Pemerintah Polandia menyakini bahwa terdapat banyak penyebab lain yang membuat kerusakan lingkungan dan deforestasi sehingga tidak harus selalu dikaitkan dengan industri kelapa sawit. Pemerintah Polandia memberikan dukungan yang ditunjukan melalui kunjungan resmi perwakilan Polish-Indonesia Parliamentary, Mr. Bartosz Kownacki pada tanggal 24 Oktober 2019 di tempat kerja Wakil Ketua DPR RI, Jakarta. Pertemuan itu telah menyetujui peningkatan kerjasama investasi perdagangan antara Polandia dengan Indonesia dalam sektor kelapa sawit.

Selain itu Pada 2 Juni 2021 Indonesia melakukan promosi kelapa Sawit berkelanjutan ISPO dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Perwakilan Uni Eropa, Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan, Josep Borrell di Jakarta. Dari pertemuan tersebut membahas hal yang berhubungan dengan kerjasama di bidang ekonomi, langkah penanganan covid 19 bersama, hingga isu kelapa sawit setelah diterbitkannya RED II. Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan melalui penguatan sertifikasi ISPO.

Alternatif Strategis Lainnya

Dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia selama menjalankan diplomasi ekonomi terdapat beberapa kemungkinan yang dapat menghambat laju ekspor CPO khususnya sebagai biodiesel, terdapat aturan baru yang lebih kompleks dari RED II, salah satunya European Green Deal (EGD) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Kedua yaitu hambatan tarif dan non-tarif, hambatan tarif berupa pemberlakuan bea masuk terhadap biodiesel jenis CPO sebesar 8-18% akibat adanya tuduhan subsidi yang dilakukan Indonesia dan kampanye-kampanye negatif dari Uni Eropa turut menjadi faktor yang menghambat keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu adanya persaingan industri biofuel, hal tersebut dikarenakan petani biofuel domestik Uni Eropa seperti rapeseed dan bunga matahari melakukan protes ke Uni Eropa untuk mengembalikan dominasi minyak nabati domestik mereka. Hambatan-hambatan ini menyebabkan upaya diplomasi Indonesia mengalami hambatan dalam mengatasi RED II serta tuduhan terkait isu-isu deforestasi dan lingkungan. Hambatan perdagangan dari Uni Eropa yang semakin kompleks menunjukan bahwa Uni Eropa bukan lagi pasar yang potensial untuk menyalurkan komoditas Crude Palm Oil (CPO) Indonesia. Penurunan ekspor CPO ke Uni Eropa sangat berdampak pada laju ekspor CPO, untuk itu diperlukan langkah alternatif yang dapat memperlancar keberlangsungan industri minyak sawit.

Pasar Alternatif Ekspor Crude Palm Oil Indonesia

Indonesia terancam akan kehilangan salah satu pasar utamanya di Uni Eropa sehingga diperlukan langkah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bersamaan dengan itu arah diplomasi ekonomi Indonesia difokuskan untuk mempertahankan pasar yang telah dibangun sebelumnya dan membuka pasar baru. Cina dan India merupakan dua pasar utama CPO Indonesia. kedua negara tersebut telah mengimpor CPO melebihi negara-negara Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol dan Italia yang memang telah melemah beberapa tahun terakhir.

Negara	2018	2019	2020	2021	2022
India	3,561.5	2,252.0	2,987.3	3,337.8	5,321.1
Tiongkok	2,637.6	3,019.7	2,867.5	4,825.9	3,997.4
Pakistan	1,445.7	1,169.1	1,667.4	2,794.3	3,133.5
Amerika Serikat	756.8	658.6	784.5	1,816.8	2,222.2
Bangladesh	846.7	705.2	697.2	1,363.2	1,475.2
Mesir	577.7	581.1	657.7	1,119.2	824.5
Belanda	711.6	480.2	460.2	615.7	683.2
Spainyol	718.7	572.0	757.4	996.8	670.6
Italia	544.8	410.2	626.6	622.7	659.2
Singapura	240.1	274.7	234.4	63.6	146.0
Total 10 Negara	12,041.2	10,122.8	11,740.2	17,556.0	19,132.9
Lainnya	5,857.6	5,451.6	6,703.8	11,050.0	10,522.9
Total Nilai (juta USD)	17,898.8	15,574.4	18,444.0	28,606.0	29,655.8

Tabel 1. Negara Tujuan Ekspor Crude Palm Oil Indoensia (Sumber: BPS, 2023)

Tabel tersebut menunjukkan jika Cina dan India merupakan negara tujuan teratas selama menurunnya ekspor CPO ke Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan volume dari dua negara itu dapat menyeimbangi penurunan ekspor ke Uni Eropa.

Pemerintahan Indonesia dalam menjalankan diplomasi ekonomi telah memetakan secara kasar negara-negara dan wilayah-wilayah yang menjadi mitra dagang Indonesia ke dalam dua kategori, yaitu pasar tradisional dan pasar non-tradisional. Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan bahwa negara-negara dan kawasan yang masuk kategori pasar tradisional Indonesia antara lain adalah ASEAN, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa Barat. Sedangkan pasar non-tradisional Indonesia meliputi negara Eropa Tengah dan Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. (Dewani, 2023) Demikian selain mempertahankan pasar yang telah ada sebelumnya, Indonesia dapat mencari alternatif lain dengan menyalurkan CPO ke negara-negara non-tradisional. Di negara Asia Selatan selain India terdapat Pakistan yang berpotensi dapat menjadi pasar utama Indonesia, mengingat bahwa dalam beberapa tahun terakhir Pakistan mengimpor minyak nabati Indonesia dengan jumlah cukup besar. (Gunawan, 2021)

Kawasan Afrika juga memiliki potensi untuk menjadi target pasar ekspor CPO Indonesia. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, menyatakan bahwa kawasan Afrika khususnya Afrika Timur berpotensi untuk menjadi pasar bagi komoditas CPO karena populasinya yang mencapai hampir 380 juta orang di 18 negara. Melihat potensi dari negara-negara kawasan tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan negara Afrika dan Asia tersebut sebagai pasar alternatif dan menjadi target pasar baru bagi CPO Indonesia. Dengan begitu penting bagi pemerintah Indonesia untuk mendorong kerjasama bersama negara-negara kawasan tersebut. (CNBC Indonesia, 2023)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO ke Afrika Barat meningkat tajam pada tahun 2023, negara-negara tersebut meliputi Benin, Kenya, dan Jibuti. Ekspor ke negara Afrika Barat tersebut mencapai total 28,2 ribu ton pada Mei 2023 atau naik 111,2% (month to month/mtm). Secara kumulatif ekspor ke Benin pada Januari-Mei 2023 tercatat mencapai 116,5 ribu ton atau meningkat 835,6%. Kemudian Ekspor ke Kenya mencapai 90 ribu ton atau meningkat 759,6% pada periode yang sama. Sedangkan ekspor ke Jibuti sebesar 33,4 ribu ton pada Mei atau meningkat 452,6%. Selain itu di Afrika Barat mesir menjadi tujuan ekspor terbesar pada 2023 mencapai 79,9 ribu ton. (CNBC Indonesia, 2023)

Hilirisasi Industri Kelapa Sawit

Hilirisasi industri kelapa sawit dapat menjadi strategi penting untuk menimalisir dampak CPO Indonesia khususnya sebagai biofuel jika sudah tidak dapat di ekspor lagi ke Uni Eropa. Hal tersebut ditunjang dari kondisi perkebunan kelapa sawit hingga produksi minyak sawit yang menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menjalankan hilirisasi turunan CPO dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian negara. Selain itu besarnya permintaan dan peluang pasar berbagai produk turunan CPO menjadi kesempatan yang dapat dioptimalkan dalam menopang perekonomian nasional dalam dimensi jangka menengah dan panjang.

Berdasarkan data statistik Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2023, produksi CPO Indonesia mencapai 50,07 juta ton dan minyak kelapa sawit kernel (PKO) sebesar 4,77 juta ton. (GAPKI, 2024) Penurunan konsumsi CPO dari pasar Uni Eropa dapat menjadi peluang bagi pelaku bisnis kelapa sawit nasional untuk berinovasi. Oleh karena

itu, memajukan hilirisasi produk turunan minyak kelapa sawit dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menghadapi dampak dari RED II.

Hilirisasi industri kelapa sawit sendiri sudah berjalan sejak 2007, yang mana terdapat peta jalan pengembangan industri hilir kelapa sawit diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian nomor 13 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 111/M-IND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, yang menjadi prakarsa penentuan prioritas pengembangan industri hilir kelapa sawit. Namun walaupun mengalami peningkatan produk turunan yang awalnya hanya 54 jenis pada 2007 menjadi sebanyak 179 ditahun 2023, jumlah tersebut masih kalah dengan Malaysia yang berhasil mengembangkan 260 jenis produk turunan dari hilirisasi sawit. (Rizky, 2024.)

Kementerian Perindustrian sebelumnya menyebutkan bahwa ada tiga jalur pengembangan industri turunan minyak kelapa sawit di dalam negeri yang masih memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Pertama, adalah pengembangan industri oleopangan (oleofood complex), di mana industri-industri memproses produk dari industri pengolahan minyak kelapa sawit untuk menghasilkan produk antara seperti produk antara oleopangan (intermediate oleofood) hingga produk jadi oleopangan (oleofood product). Beberapa produk turunan oleopangan yang telah dihasilkan di Indonesia meliputi minyak goreng kelapa sawit, margarin, vitamin A, vitamin E, shortening, ice cream, creamer, cocoa butter atau specialty-fat. (Rizky, 2024.)

Kedua, adalah pengembangan industri oleokimia (oleochemical complex), di mana industri-industri memproses produk dari industri pengolahan minyak kelapa sawit untuk menghasilkan produk turunan oleokimia. Produk turunan ini mencakup produk dasar oleokimia hingga produk jadi seperti biosurfaktan untuk deterjen, sabun, dan shampoo. Selain itu, juga termasuk biolubrikan (biopelumas) dan biomaterial seperti bioplastik. Ketiga, adalah pengembangan industri biofuel (biofuel complex), di mana industri-industri memproses produk dari industri refinery untuk menghasilkan produk biofuel hingga turunan biofuel seperti biodiesel, biogas, biopremium, bioavtur, dan lain-lain.

Program hilirisasi industri kelapa sawit akan memberikan berbagai manfaat yang meliputi optimalisasi penyerapan hasil produksi petani kecil, penyediaan bahan pangan, non-pangan, dan bahan bakar terbarukan, serta membangkitkan ekonomi produktif berbasis industri pengolahan. Selain itu, hilirisasi industri kelapa sawit juga mampu meningkatkan pendapatan devisa negara dari ekspor produk turunan, memberikan kontribusi pada keuangan negara melalui penerimaan pajak dan bukan pajak, serta menyuplai kebutuhan dunia akan pangan dan energi. (Indonesia.go.id, 2024)

Kebijakan Mandatori Biodiesel

Hilirisasi industri minyak kelapa sawit melalui program biodiesel seperti B-20, B-30, dan tujuan akhirnya B-100 merupakan langkah yang strategis bagi Indonesia dalam menghadapi permasalahan terkait regulasi RED II Uni Eropa. Langkah ini diambil karena penyerapan minyak kelapa sawit di dalam negeri akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas harga minyak kelapa sawit. Sebagai produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia, Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan harga CPO global. Program mandatori pemerintah Indonesia menjadi salah satu instrumen untuk menjaga stabilitas harga CPO, karena setiap pengurangan 1 juta ton stok CPO dapat meningkatkan harga CPO sebesar USD 96 per ton. (Kompas.com, 2023)

Hilirisasi industri kelapa sawit dapat mendukung pelaksanaan program mandatori biodiesel yang telah berlangsung sejak 2015, mulai dari B15, B20, B30, dan B35 pada tahun 2023. Selanjutnya, penting bagi Indonesia untuk menerapkan B40, B50, hingga B100 dengan komposisi Biodiesel FAME dan Greenfuel, yang merupakan produk hilir tingkat lanjut dari minyak kelapa sawit untuk bahan bakar terbarukan. (Indonesia.go.id, 2024) Hilirisasi industri CPO dapat menjadi solusi untuk menghadapi gejolak harga. Data Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) menunjukkan bahwa harga TBS petani sawit setelah implementasi mandatori B30 meningkat menjadi Rp1.800-2.550 per kilogram, lebih tinggi dari harga pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar Rp700-1.200 per kilogram. (APROBI, 2023)

Saat ini, kapasitas terpasang pabrik biodiesel mencapai 17,5 juta ton per tahun, sementara kapasitas terpasang industri oleofood mencapai 2,7 juta ton per tahun, dan kapasitas terpasang industri oleokimia mencapai 11,6 juta ton per tahun. (Kompas.com, 2023)

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, selain dapat mengurangi dampak dari regulasi RED II Uni Eropa, pemerintah Indonesia juga dapat meningkatkan pendapatan negara melalui program mandatori biodiesel dengan adanya kenaikan harga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia merupakan negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan memasok lebih dari setengah kebutuhan minyak kelapa sawit global. Industri minyak kelapa sawit, khususnya CPO memainkan peran penting sebagai komoditas perdagangan utama antara Indonesia dengan Uni Eropa. Namun Indonesia harus menghadapi Delegated Regulation Supplementing Directive of the EU Renewable Energy Directive II yang secara bertahap akan menghentikan penggunaan CPO sebagai biofuel. Sejak diberlakukannya kebijakan Renewable Energy Directive II oleh Uni Eropa, seluruh atensi para pemangku kepentingan difokuskan untuk mengatasi masalah CPO. Mulai dari mendorong sertifikasi keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan optimalisasi diberbagai organisasi internasional seperti CPOPC, ASEAN dan WTO.

Diplomasi ekonomi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya yaitu Indonesia berhasil untuk melobi Uni Eropa dengan menunda larangan penggunaan biofuel berbasis CPO dari tahun 2021 menjadi tahun 2030. Hasil tersebut bermanfaat dalam memberikan kesempatan bagi industri kelapa sawit untuk membenahi tata kelola perkebunan dan pengelolaannya agar sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dalam regulasi Uni Eropa. Diplomasi ekonomi Indonesia juga berhasil membentuk kerja sama bilateral Indonesia-Belanda dalam produksi sawit berkelanjutan dengan rentan waktu 5 tahun atau dari tahun 2019 hingga tahun 2023.

Akan tetapi dari beberapa keberhasilan tersebut, diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia belum mampu untuk memperlancar keberlangsungan industri sawit di pasar Uni Eropa. Berbagai upaya yang dilakukan baik melalui diplomasi ekonomi, negosiasi maupun perbaikan dalam produksi dan pengelolaan kelapa sawit nyatanya belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hambatan perdagangan tetap dijalankan sehingga ekspor CPO ke Uni Eropa masih tetap dibatasi. Berbagai hambatan perdagangan CPO ke Indonesia ini menunjukkan jika pasar Uni Eropa sudah tidak potensial lagi bagi komoditas CPO Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan alternatif lain, seperti membuka pasar baru di negara-negara seperti di Afrika dan Timur Tengah yang berpotensi menjadi pasar alternatif untuk ekspor CPO yang tidak tersalurkan ke Uni Eropa. Pemerintah juga perlu mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, baik dalam sektor oleokimia, pangan, maupun produksi biodiesel, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir dampak negatif dari hambatan perdagangan CPO ke Uni Eropa dan meningkatkan daya saing ekspor CPO di pasar internasional.

Reference

Jurnal

- Alfianisa, I. N. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(08), 1271–1285. <https://doi.org/10.59141/jiss.v2i08.384>
- APROBI. (2009, May 23). Biodiesel Topang Harga Minyak Sawit di Tengah Disrupsi Ekonomi Global—APROBI. APROBI. <https://www.aprobi.or.id/biodiesel-topang-harga-minyak-sawit-di-tengah-disrupsi-ekonomi-global/>
- As, R. Z. (2022). Analisis Diplomasi Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Crude Palm Oil Terhadap Uni Eropa Periode 2019-2021 [bachelorThesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67813>
- Bakry, U. S. (2016). *Pedoman Penulisan Skripsi Hubungan Internasional*. Deepublish.

- Bangun, S. Z. B., & Hidayat, T. (2020). The European Union Trade Protection on Indonesian Crude Palm Oil (CPO) Import. *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), 1–14.
- Dewani, N. S. (2023). ANALISIS DIPLOMASI MINYAK INDONESIA KE ITALIA. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan Dan Sosial*, 5(1), 48–60. <https://doi.org/10.51747/publicio.v5i1.1213>
- Gunawan, M. D. R. (2021). Ekspansi Pasar Ekspor Kelapa Sawit Indonesia Dan Respons Terhadap Embargo Ekonomi Uni Eropa Tahun 2018-2020. <https://dspace.uji.ac.id/handle/123456789/33665>
- Lorensia, N. N. P., Kusuma, R. P., & Elistania, E. (2022). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit Oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II Tahun 2018—2022. *Balcony*, 6(2), Article 2.
- PASPI. (2022). MINYAK SAWIT DALAM NEGARA/KAWASAN “DEFORESTATION FREE”. *III*, No.16, 691–693.
- Riady, C., Badarul, K., & Hii, H. (2023). Analisis Upaya Indonesia dalam Melawan Black Campaign Minyak Kelapa Sawit dari Uni Eropa. *Proyeksi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 28(1), Article 1. <https://doi.org/10.26418/proyeksi.v28i1.2901>
- Rizky, M. (n.d.). RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu? *CNBC Indonesia*. Retrieved June 9, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240201152542-4-510888/ri-tertinggal-malaysia-temukan-harta-karun-mahal-di-sawit-apa-itu>
- Suwarno, W. (2019). Kebijakan sawit uni Eropa dan tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 23–34.
- Zahir, B. T. L. (2022). KEBIJAKAN UNI EROPA MENGELUARKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA TAHUN 2018. Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.

Basis Data Online

- GAPKI (2024). Kinerja Industri Minyak Sawit Tahun 2023 & Prospek Tahun 2024. <https://gapki.id/news/2024/02/27/kinerja-industri-minyak-sawit-tahun-2023-prospek-tahun-2024/>. Diakses pada 13 April 2024
- CNN Indonesia. (2019). Menlu Janji Perjuangkan Kepentingan Sawit Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191029161325-106-443835/menlu-janji-perjuangkan-kepentingan-sawit-indonesia>. Diakses pada 11 Maret 2024
- BPD PKS (2019). Hasil Diplomasi Joint Mission Sawit ke Uni Eropa. <https://www.bpd.or.id/Hasil-Diplomasi-Joint-Mission-Sawit-ke-Uni-Eropa>. Diakses pada 10 Maret 2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (2024). Embassy of the Republic of Indonesia in Brussels accredited to Luxembourg & the European Union Belgium. from <https://kemlu.go.id/brussels/en>. Diakses pada 24 Maret 2024
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2024) Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Pemerintah Lanjutkan Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan—(n.d.). <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5699/gelar-rapat-koordinasi-nasional-pemerintah-lanjutkan-rencana-aksi-perkebunan-kelapa-sawit-berkelanjutan>. Diakses pada 8 Mei 2024
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.(2020). Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2020-2024. Dari

- L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9BS0lQL0t1bWVudGVyaWFuJTlwTHVhciUyME5lZ2VyaS9UYWh1biUyMDlwMjAvUmVuc3RyYSUyMEt1bWVubHUIAjAyMDlwLTlwMjQucGRm (kemlu.go.id). Diakses pada 4 Maret 2024
- Indonesia.go.id—Menghitung Cuan Hilirisasi Industri Sawit. (n.d.). Retrieved June 15, 2024, from <https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/7928/menghitung-cuan-hilirisasi-industri-sawit?lang=1>. Diakses pada 8 Mei 2024
- Kompas.com. (2023.). Hilirisasi Industri dan Dampaknya bagi Perekonomian Nasional. <https://money.kompas.com/read/2023/09/04/172629826/hilirisasi-industri-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-nasional>. Diakses pada 10 Mei 2024
- Liputan 6. (2023, Mei). 27 Negara Uni Eropa Adopsi Aturan Baru Soal Terkait Deforestasi hingga Kelapa Sawit—Global Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/5294652/27-negara-uni-eropa-adopsi-aturan-baru-soal-terkait-deforestasi-hingga-kelapa-sawit>. Diakses pada 8 Maret 2024
- Liputan 6. (2023). 27 Negara Uni Eropa Adopsi Aturan Baru Soal Terkait Deforestasi hingga Kelapa Sawit—Global Liputan6.com. <https://www.liputan6.com/global/read/5294652/27-negara-uni-eropa-adopsi-aturan-baru-soal-terkait-deforestasi-hingga-kelapa-sawit>. Diakses pada 8 Maret 2024
- CNBC Indonesia (2024) Selamat Pak Jokowi! Ekspor CPO Ke Negara Afrika Melonjak 800%. from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230616131234-128-446571/selamat-pak-jokowi-ekspor-cpo-ke-negara-afrika-melonjak-800>. Diakses pada 23 April 2024
- Tempo. (2023). 11 Negara Penghasil Sawit Terbesar di Dunia 2023, Indonesia Nomor 1. Tempo. <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/482145/11-negara-penghasil-sawit-terbesar-di-dunia-2023-indonesia-nomor-1>. Diakses pada 11 Januari 2024